



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN
SPANYOL MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL
(*AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SPAIN RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara kedua negara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol telah menandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (*Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain relating to Scheduled Air Services*) pada tanggal 5 Oktober 1993 di Madrid, Spanyol;
- c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (*Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain relating to Scheduled Air Services*);
- d. bahwa. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (*Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain relating to Scheduled Air Services*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL (*AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES*).

Pasal 1. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (*Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain relating to Scheduled Air Services*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1993 di Madrid, Spanyol.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (*Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain relating to Scheduled Air Services*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL

MENGENAI

DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL

PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL
MENGENAI
DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol dalam persetujuan ini disebut sebagai Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian;

Sebagai peserta Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah terbuka untuk ditanda tangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944;

Berhasrat untuk membuat Persetujuan berdasarkan Konvensi tersebut, untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan berjadwal antara dan di luar wilayah masing-masing.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Untuk maksud persetujuan ini, kecuali di tentukan lain ;

- (a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944 dan mencakup setiap lampiran yang disetujui berdasarkan pasal 90 Konvensi, dan setiap perubahan dari lampiran-lampiran atau Konvensi berdasarkan Pasal-Pasal 90 dan 94 dari Konvensi tersebut, sepanjang lampiran-lampiran dan perubahan itu telah berlaku atau telah diratifikasi oleh kedua Pihak yang mengikat Perjanjian;

- (b) Istilah "Pejabat-Pejabat Penerbangan" berarti, dalam hal Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan dalam hal Kerajaan Spanyol, Menteri Transportasi, Pariwisata dan Perhubungan (Direktur Jenderal Penerbangan Sipil), atau dalam hal kedua-duanya, setiap orang atau badan yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut;
- (c) Istilah "Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk" berarti, sebuah perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk sesuai dengan pasal III persetujuan ini;
- (d) Istilah "Wilayah" berarti, wilayah darat dan wilayah laut yang dirumuskan di dalam hukum nasional masing-masing sebagaimana maksud Pasal 2 Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional (1944), maupun Bagian IV dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut;
- (e) Istilah "Dinas Penerbangan", "Dinas Penerbangan Internasional", "Perusahaan Penerbangan" dan "Berhenti untuk Tujuan bukan untuk Angkutan", masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi;
- (f) Istilah "Persetujuan", yang dimaksud adalah Persetujuan ini, termasuk Lampiran maupun setiap perubahannya.
- (g) Istilah "Rute Terperinci" adalah rute yang dibuat atau yang ditetapkan di dalam Lampiran dari Persetujuan ini;
- (h) Istilah "Kesepakatan Penerbangan" adalah dinas-dinas penerbangan internasional yang dilaksanakan pada rute-rute terperinci sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan ini;
- (i) Istilah "Tarif" berarti harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi serta muatan dan persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga ini, termasuk komisi dan pembayaran tambahan lainnya untuk agen atau penjualan dokumen-dokumen pengangkutan, tetapi tidak termasuk pembayaran atau syarat-syarat untuk angkutan pos.

Pasal II

HAK-HAK ANGKUT

- (1) Masing-masing pihak yang mengikat Perjanjian memberikan kepada Pihak lainnya hak-hak yang diperinci dalam persetujuan ini, dengan maksud untuk menetapkan dinas-dinas penerbangan pada rute-rute yang diperinci dalam bagian dari Tambahan Persetujuan ini.
- (2) Perusahaan Penerbangan dari masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian akan menikmati hak-hak istimewa sebagai berikut :
 - (a) terbang melintasi wilayah Pihak lainnya tanpa mendarat;
 - (b) mendarat di wilayah tersebut untuk maksud bukan angkutan; dan
 - (c) melakukan pendaratan di dalam wilayah Pihak lainnya pada tempat-tempat yang ditetapkan pada rute tersebut di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, untuk memuat dan menurunkan lalu lintas internasional berupa penumpang, muatan, barang dan pos berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, ke atau dari tempat-tempat di wilayah Pihak Berjanji lainnya atau ke atau dari tempat-tempat di wilayah negara lain.
- (3) Ayat (2) dari pasal ini tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan-perusahaan dari salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, muatan, barang dan pos dalam wilayah Pihak lainnya, untuk diangkut dengan atau tanpa pembayaran dengan tujuan suatu tempat lain dalam wilayah Pihak yang mengikat Perjanjian tersebut.
- (4) Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, penyelenggaraan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah rawan atau yang dikuasai militer atau didaerah yang dipengaruhi keadaan tersebut, sesuai dengan pasal 9 Konvensi memerlukan izin dari Penguasa Militer yang berwenang.

Pasal III

KEPERLUAN OTORISASI

- (1) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak menunjuk secara tertulis kepada Pihak lainnya sebuah Perusahaan Penerbangan untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute yang ditetapkan.
- (2) Setelah menerima penunjukan tersebut, Pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan ayat (4) dan (5) dari Pasal ini, tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk.
- (3) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, untuk mencabut penunjukan terhadap suatu perusahaan penerbangan tertentu dan menunjuk perusahaan penerbangan yang lain.
- (4) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian dapat diminta untuk membuktikan bahwa dia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang lazim dan sewajarnya dilaksanakan dalam dinas-dinas penerbangan internasional oleh Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.
- (5) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak untuk menolak izin operasi seperti disebut dalam ayat (2) Pasal ini, atau menentukan beberapa syarat yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang diperinci dalam Pasal (II) Persetujuan ini, Apabila salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian tidak puas atas bukti yang menunjukkan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak lain yang menunjuk perusahaan penerbangan itu atau dalam tangan warga negaranya.
- (6) Bilamana sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan memperoleh izin maka dia dapat setiap waktu memulai operasi dinas-dinas penerbangan, dengan syarat bahwa tarif yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal (X) Persetujuan ini telah berlaku dan persetujuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal (V) dari Persetujuan ini telah dicapai sehubungan dengan operasi dinas-dinas penerbangan tersebut.

Pasal IV

PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN IZIN OPERASI

- (1) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak untuk mencabut izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak istimewa oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya seperti diperinci dalam Pasal (II) Persetujuan ini, atau menentukan beberapa syarat yang dianggap perlu untuk pelaksanaan hak-hak tersebut :
 - (a) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak dari pemilikan dan pengawasan langsung atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang lain yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya, atau;
 - (b) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari Pihak lain yang memberikan hak-hak ini, atau;
 - (c) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu beroperasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam Persetujuan ini.
- (2) Kecuali apabila perlu segera diambil tindakan-tindakan pembatalan, untuk mencegah pelanggaran hukum atau peraturan maka hak-hak penangguhan atau pengenaan dari syarat-syarat yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini hanya akan dilaksanakan setelah melakukan konsultasi dengan Pihak yang lain. Dalam hal demikian konsultasi akan mulai diadakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung mulai tanggal permintaan konsultasi yang diajukan oleh salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian.

Pasal V

PENGATURAN KAPASITAS

- (1) Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan menikmati kesempatan yang sama dan adil dalam operasi dinas-dinas penerbangan yang disetujui pada rute-rute terperinci.
- (2) Dinas-dinas penerbangan yang dilakukan pada setiap rute terperinci dalam Lampiran dari Persetujuan ini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas angkutan dan terutama ditujukan untuk mengangkut lalu lintas dari dan ke wilayah Pihak Berjanji yang telah menunjuk perusahaan penerbangan itu.
- (3) Didalam melaksanakan operasi dinas-dinas penerbangan, perusahaan yang ditunjuk masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian akan memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan dari Pihak lainnya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi dinas-dinas penerbangan dari perusahaan penerbangan Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama.
- (4) Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat penerbangan yakni, menyinggahi atau mengakhiri penerbangan di wilayah Pihak Berjanji lainnya hendaknya disepakati antara pejabat-pejabat penerbangan sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal ini, kemudian dikukuhkan dalam bentuk pertukaran surat diantara pejabat-pejabat penerbangan dari para Pihak Berjanji.
- (5) Setiap penambahan kapasitas atau frekwensi penerbangan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak Berjanji lainnya hendaknya disetujui antara pejabat-pejabat penerbangan, berdasarkan perkiraan permintaan akan angkutan antara wilayah kedua Pihak yang mengikat Perjanjian dan lalu lintas angkutan lainnya yang akan disepakati bersama. Selama belum dicapai persetujuan atau pengaturan kapasitas maupun jumlah frekwensi yang telah dilaksanakan hendaknya tetap diberlakukan.

Pasal VI

SURAT-SURAT KETERANGAN

- (1) Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian selama masa berlakunya akan diakui oleh Pihak Berjanji lainnya untuk tujuan melaksanakan operasi penerbangan pada rute-rute yang telah disetujui di dalam Annex Persetujuan ini, dengan syarat bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan keterangan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku adalah sama atau di atas standar minimum yang mungkin dibuat sesuai ketentuan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.
- (2) Masing-masing Pihak Berjanji berhak pula untuk tidak mengakui berlakunya surat-surat keterangan kecakapan maupun izin-izin yang diberikan pada warga negaranya oleh Pihak yang mengikat Perjanjian lainnya untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.

Pasal VII

KEAMANAN PENERBANGAN

- (1) Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan dalam tindakan utama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi mengenai Kejahatan dan Tindakan-Tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Tindakan melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di The Hague pada tanggal 16 Desember 1970 dan Konvensi mengenai Tindakan melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971.
- (2) Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan menyediakan atas permintaan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum lainnya terhadap keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
- (3) Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan, dalam hubungan bersama mereka, bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditunjuk sebagai Lampiran-Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku kepada Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian; mereka akan meminta bahwa operator pesawat yang terdaftar ditempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap di dalam wilayah mereka bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.
- (4) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian sepakat bahwa operator pesawat terbang tersebut dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dengan menunjuk kepada ayat di atas yang diminta oleh Pihak yang mengikat Perjanjian lainnya untuk memasuki, berangkat dari atau sementara berada di dalam wilayah Pihak yang mengikat Perjanjian lainnya.

- (5) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian akan menjamin bahwa tindakan yang tepat sangat efektif untuk diterapkan di dalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan untuk memeriksa para penumpang, awak pesawat, barang-barang cangkungan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama berada dalam pesawat atau dikeluarkan. Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian akan selalu memberikan pertimbangan yang simpati untuk setiap permintaan dari Pihak yang mengikat Perjanjian lainnya untuk mengambil tindakan-tindakan keamanan khusus yang layak untuk dapat menjawab ancaman tersebut.
- (6) Bilamana terjadi suatu kejadian atau tindakan melawan hukum terhadap pesawat terbang atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan membantu satu sama lain dengan cara menyediakan fasilitas komunikasi dan bantuan lainnya untuk mencegah dengan segera dan aman kejadian atau tindakan melawan hukum tersebut.
- (7) Oleh sebab itu masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian akan memberi nasihat kepada Pihak Berjanji lainnya setiap perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek-praktek dan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan. Salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Pihak Berjanji lainnya setiap saat untuk membicarakan setiap perbedaan-perbedaan tersebut.

Pasal VIII

PEMBEBASAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN

- (1) Pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas-dinas penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh suatu Pihak yang mengikat Perjanjian termasuk perlengkapan biasa, persediaan bahan bakar, minyak pelumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang dibawa dalam pesawat terbang tertentu akan dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain yang sejenis pada waktu mendarat di wilayah Pihak lainnya dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang itu diexport kembali.
- (2) Akan dibebaskan juga dari, pajak-pajak, biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang sama, dengan pengecualian biaya pelayanan yang dikenakan terhadap dinas-dinas penerbangan, seperti :
 - (a) perlengkapan pesawat terbang yang dimasukkan ke dalam pesawat dalam wilayah suatu Pihak yang mengikat Perjanjian dalam batas-batas yang ditetapkan oleh yang berwenang dan dimaksudkan untuk dipergunakan di atas pesawat terbang dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya;
 - (b) suku cadang yang dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak yang mengikat perjanjian untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya;
 - (c) bahan bakar dan minyak pelumas yang dipergunakan bagi pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas-dinas penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya, meskipun persediaan ini akan dipergunakan dalam bagian penerbangan di atas wilayah Pihak yang mengikat Perjanjian dimana persediaan ini telah dimuat;

(d) barang dan muatan dalam hal transit langsung.

Perlengkapan-perlengkapan yang disebut di dalam (a), (b), (c) dan (d) di atas dapat diminta untuk disimpan di bawah penguasaan dan pengawasan pihak Bea dan Cukai.

- (3) Perlengkapan pesawat biasa, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat terbang yang diterbangkan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian boleh diturunkan dalam wilayah Pihak lainnya, hanya jika ada izin dari Pejabat-Pejabat Bea dan Cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal seperti itu, barang-barang tersebut diletakkan dalam pengawasan pejabat-pejabat tersebut sampai dikeluarkan lagi atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bea dan cukai.
- (4) Sepanjang tidak dikenakan bea maupun pungutan-pungutan lainnya atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (3) Pasal ini, barang-barang lainnya tidak akan tergantung pada larangan-larangan ekonomi maupun pembatasan-pembatasan impor, ekspor dan persinggahan yang mungkin diberlakukan, kecuali larangan atau pembatasan itu diberlakukan pula kepada semua perusahaan penerbangan nasional yang terkait ketentuan-ketentuan ayat (1) sampai (3) Pasal ini.
- (5) Perlakuannya yang diperinci di dalam Pasal ini hendaknya sebagai tambahan dan tidak ditujukan untuk hal-hal dimana masing-masing Pihak Berjanji wajib menyatakan persetujuannya sesuai Pasal 24 Konvensi.

Pasal IX

LALU LINTAS TRANSIT LANGSUNG

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian, penumpang, barang dan kargo yang singgah di dalam wilayah salah satu Pihak Berjanji, pada prinsipnya tidak dikenakan pemeriksaan.

Pasal X

PENENTUAN TARIF

- (1) Tarif yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian untuk pengangkutan ke atau dari wilayah Pihak lainnya akan ditentukan pada taraf yang wajar, dengan memperhatikan sewajarnya seluruh unsur-unsur yang bersangkutan, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar, dan tarif dari perusahaan lainnya.
- (2) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini bila memungkinkan harus disetujui oleh perusahaan-perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian, setelah berkonsultasi dengan perusahaan penerbangan lainnya yang beroperasi pada keseluruhan atau sebagian dari rute, dan kesepakatan tertentu bila memungkinkan akan dicapai dengan menggunakan tata cara Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA) dalam hal menentukan tarif tersebut.
- (3) Tarif yang telah disetujui tersebut akan disampaikan untuk memperoleh persetujuan dari pejabat-pejabat Penerbangan Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum diberlakukan pada tanggal yang diajukan.
Dalam hal-hal tertentu, jangka waktu ini dapat dipersingkat, tergantung kepada kesepakatan dari masing-masing Pejabat Penerbangan.
- (4) Persetujuan tersebut dapat diberikan secara jelas. Apabila salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian tidak mengajukan ketidaksetujuan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal disampaikannya tarif tersebut, maka sesuai dengan ayat (3) Pasal ini tarif dianggap telah disetujui. Dalam hal penetapan jangka waktunya dipersingkat, sebagaimana maksud ayat (3), maka para Pejabat Penerbangan Pihak yang mengikat Perjanjian harus mengajukan ketidaksetujuan dalam jangka waktu kurang dari tiga puluh hari.
- (5) Apabila suatu tarif tidak dapat disetujui berdasarkan ayat (2) Pasal ini, atau jika, selama jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (4) Pasal ini, Pejabat Penerbangan salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian memberitahukan secara tertulis tentang ketidaksetujuan terhadap tarif yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan ayat (2) kepada Pihak lainnya. Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian, setelah berkonsultasi dengan pejabat-

pejabat penerbangan negara lain, akan berusaha untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan bersama.

- (6) Apabila Pejabat-Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian tidak dapat menyetujui tarif yang diajukan sesuai dengan ayat (3) Pasal ini atau tidak dapat menetapkan suatu tarif sesuai dengan ayat (5) Pasal ini, maka sengketa ini diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal XVII Persetujuan ini.
- (7) Tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai ditetapkannya tarif baru.

Pasal XI

PEMINDAHAN PENDAPATAN BERSIH

- (1) Perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian diijinkan untuk menjual secara bebas jasa angkutan udara di dalam wilayah negara Pihak lainnya, baik secara langsung maupun melalui suatu agen, dengan semua jenis mata uang.
- (2) Perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji diijinkan untuk mengalihkan secara bebas kelebihan pendapatannya, dari wilayah negara Pihak lain tempat dilakukannya usaha ke negara asalnya. Termasuk juga pengalihan atas pendapatan bersih yang diperoleh dari penjualan jasa angkutan udara, baik secara langsung atau melalui agen, pelayanan tambahan dan pelengkap serta bunga yang diperoleh dari penghasilan yang disimpan sebelum dipindahkan.
- (3) Perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian harus mendapat persetujuan atas pemindahan tersebut dalam jangka 30 hari sejak tanggal diajukan permohonan, dalam mana pemindahan ini dilakukan berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat persetujuan atau berdasarkan nilai tukar resmi mata uang lokal.

Pasal XII

PENEMPATAN TENAGA PEMASARAN DAN TEKNIK

- (1) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian memperoleh kesempatan yang sama di dalam wilayah Pihak lainnya, berdasarkan asas timbal balik, untuk mengangkat pegawainya sendiri untuk ditempatkan di kantor perwakilan dan pemasaran, sebagai tenaga operasional dan teknik sesuai dengan kebutuhan sehubungan dengan pelaksanaan dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui.
- (2) Pengangkatan tenaga-tenaga ini, atas permintaan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian, disesuaikan dengan kebutuhan atau dipekerjakan pada organisasi lain, perusahaan atau perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah pihak lainnya, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pelayanan tersebut di wilayah negara Pihak lainnya.
- (3) Perwakilan dan tenaga-tenaga yang dipekerjakan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara Pihak Berjanji lainnya, dan berkaitan dengan pemberlakuan hukum dan peraturan-peraturan tersebut, berdasarkan asas timbal balik dan minimum penundaan, masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian harus menjamin dikeluarkannya surat izin kerja, visa kunjungan atau dokumen-dokumen sejenis lainnya yang diperlukan oleh perwakilan dan tenaga-tenaga yang dipekerjakan sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian harus mengeluarkan surat izin kerja atau visa kunjungan atau dokumen-dokumen sejenis lainnya dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan tertentu yang bersifat sementara dan tugas-tugas yang dilakukan tenaga-tenaga tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak Berjanji menentukan lain. Apabila diminta, pejabat-pejabat dari Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian harus segera mengeluarkan surat izin kerja, visa kunjungan atau dokumen-dokumen sehingga tidak memperlambat kedatangan tenaga-tenaga tersebut ke wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal XIII

PENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN

- (1) Pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Pihak-Pihak mengikat Perjanjian yang mengatur tentang masuk atau keluarnya pesawat terbang sehubungan dengan penerbangan internasional atau berkaitan dengan penggunaan pesawat terbang di dalam wilayah Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian.
- (2) Pesawat terbang perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian harus tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan dari Pihak-Pihak Berjanji berkenaan dengan pengaturan tentang masuk, singgah dan keluarnya penumpang, awak pesawat terbang, bagasi, pos dan kargo, dan juga berlaku peraturan-peraturan imigrasi, bea dan cukai dan sanitasi, berkaitan dengan syarat-syarat untuk masuk dan keluar dari salah satu wilayah negara Pihak Berjanji.

Pasal XIV

K O N S U L T A S I

- (1) Para pejabat penerbangan Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian akan berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk menjalin kerjasama yang erat dalam hal melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan ini maupun ketentuan Tambahan yang menyertainya.
- (2) Konsultasi akan dimulai dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan, kecuali diperjanjikan lain oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian.

Pasal XV

PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Apabila salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian menganggap perlu untuk merubah suatu ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat meminta konsultasi kepada Pihak lainnya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan dengan cara perundingan diantara pejabat-pejabat penerbangan Pihak-Pihak Berjanji atau melalui surat menyurat dan harus dimulai dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal permintaan. Setiap perubahan-perubahan yang telah disetujui akan mulai berlaku pada saat dilakukan pertukaran nota diplomatik.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan dalam Lampiran dari Persetujuan ini harus disepakati bersama diantara pejabat-pejabat yang berkepentingan dari Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian dan dikukuhkan melalui pertukaran nota diplomatik.

Pasal XVI

PENGIKATAN DIRI TERHADAP KONVENSI MULTILATERAL

Dalam hal disepakatinya suatu konvensi multilateral yang menyangkut angkutan udara dimana Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian sama-sama terikat di dalamnya, Persetujuan ini akan dirubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Pasal XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika timbul suatu perselisihan antara Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka Pihak-Pihak Berjanji akan terlebih dahulu menyelesaikan melalui perundingan diantara mereka.
- (2) Jika Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian gagal mencapai suatu persetujuan dengan perundingan, atas persetujuan bersama dapat mengajukan perselisihan tersebut untuk diputuskan kepada beberapa orang atau badan, atau atas permintaan salah satu Pihak Berjanji, perselisihan tersebut dapat diajukan untuk diputuskan kepada makamah yang terdiri dari tiga orang juru damai (arbitrators), masing-masing Pihak Berjanji mengangkat seorang, dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua juru damai yang telah diangkat tadi. Masing-masing Pihak Berjanji harus mengangkat seorang juru damai dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya suatu pemberitahuan melalui saluran-saluran diplomatik oleh salah satu Pihak Berjanji yang meminta penyelesaian perselisihan itu, dan juru damai yang ketiga harus ditunjuk dalam waktu enam puluh (60) hari berikutnya. Jika salah satu Pihak Berjanji gagal mengangkat juru damai di dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau jika juru damai yang ketiga tidak ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka salah satu Pihak Berjanji dapat meminta kepada Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk seorang juru damai atau juru-juru damai sebagaimana diperlukan. Dalam segala hal, juru damai yang ketiga harus berasal dari negara ketiga dan harus bertindak sebagai ketua badan Perwasitan (arbitral body).
- (3) Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian berkewajiban untuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini.
- (4) Jika dan selama salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk tidak mentaati suatu keputusan yang ditetapkan menurut ayat (3) Pasal ini, maka Pihak lainnya dapat membatasi, menahan atau mencabut hak-hak atau wewenang apapun yang telah diberikan berdasarkan Persetujuan ini kepada perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji tersebut, atau kepada perusahaan penerbangan yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal XVIII

PERTUKARAN DATA STATISTIK

Para Pejabat Penerbangan dari salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian akan memberikan kepada para Pejabat Penerbangan dari Pihak lainnya atas permintaannya akan dokumen-dokumen atau lain-lain data tentang statistik yang layak diperlukan untuk maksud meninjau kemampuan yang diberikan pada dinas-dinas penerbangan yang disetujui oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian.

Pasal XIX

PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

- (1) Salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini.
- (2) Dalam hal demikian, Perjanjian akan habis masa berlakunya dalam dua belas (12) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri itu dicabut kembali atas persetujuan bersama sebelum tenggang waktu tersebut habis. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Pasal XX

P E N D A F T A R A N

Persetujuan ini dan semua perubahan-perubahan yang menyertainya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Pasal XXI
MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat dilaksanakan pada tanggal penandatungannya dan secara resmi berlaku segera setelah Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan yang menyangkut ketentuan konstitusi masing-masing Pihak tentang masa berlakunya telah dipenuhi.

Untuk menguatkannya, yang bertandatangan di bawah ini dengan dikuasakan penuh dengan sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua naskah pada hari ke lima, bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam Bahasa Spanyol, Indonesia dan Inggris, yang mempunyai nilai otentik yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang diberlakukan.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia



DR. HARYANTO DHANUTIRTO
MENTERI PERHUBUNGAN

Untuk Pemerintah
Kerajaan Spanyol



JAVIER SOLANA MADARIAGA
MENTERI LUAR NEGERI

L A M P I R A N

1. Bagian I.

Rute-rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Kerajaan Spanyol, untuk masing-masing jurusan :

Tempat-Tempat Pemberangkatan	Tempat-Tempat Persinggahan	Tempat-Tempat Tujuan	Tempat-Tempat Selanjutnya
Tempat-tempat di Spanyol	2 (dua) Tempat	Jakarta dan/ atau tempat lain atas dasar keepakatan bersama	Tempat-tempat selanjutnya

Bagian II.

Rute-rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Indonesia, untuk masing-masing jurusan :

Tempat-Tempat Pemberangkatan	Tempat-Tempat Persinggahan	Tempat-Tempat Tujuan	Tempat-Tempat Selanjutnya
Tempat-tempat di Indonesia	2 (dua) Tempat	Madrid dan/ atau tempat lain atas dasar keepakatan bersama	Tempat-tempat selanjutnya

2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak Berjanji hanya dapat mendarat dalam penerbangan yang sama pada satu tempat di wilayah Pihak Berjanji lainnya.
3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji dapat, baik dalam keseluruhan penerbangan atau sebagian penerbangan, untuk tidak menyinggahi tempat-tempat pada rute-rute terperinci tersebut di atas, yang mana pelaksanaan penerbangan dimulai dan berakhir didalam wilayah Pihak Berjanji yang telah menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
RELATIVO A LOS SERVICIOS AEREOS REGULARES.

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno del Reino de España, llamados desde ahora en este Acuerdo las Partes Contratantes;

Siendo Partes del Convenio de Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de Diciembre de 1.944; y

Deseosos de concluir un Acuerdo, suplementario al citado Convenio, y con el propósito de establecer servicios aéreos regulares entre y más allá de sus respectivos territorios;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

DEFINICIONES

1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que el contexto lo exija de otro modo:
 - a) El término "**Convenio**" significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de Diciembre de 1.944, e incluye cualquier Anexo adoptado en virtud del artículo 90 de dicho Convenio y cualquier modificación del Anexo o del Convenio en virtud de los artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones estén en vigor o hayan sido ratificados por ambas Partes Contratantes;
 - b) El término "**Autoridades Aeronáuticas**" significa, por lo que se refiere a la República de Indonesia, el Ministro de Comunicaciones, y, por lo que se refiere al Reino de España, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Dirección General de Aviación Civil) o, en ambos casos, cualquier persona o institución debidamente autorizada para asumir cualquier función que ejerzan las aludidas Autoridades;

c) El término "Empresa aérea designada" se refiere a la empresa aérea que haya sido designada y autorizada según lo establecido en el artículo III del presente Acuerdo;

d) El término "Territorio" significa el territorio terrestre y el mar territorial, tal y como se define en sus respectivas leyes, según lo establecido en el artículo II del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (1.944), así como la parte IV de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1.982;

e) El término "Servicio aéreo", "Servicio aéreo internacional", "Empresa aérea" y "Escala para fines no comerciales" tienen el significado que se les atribuye en el artículo 96 del Convenio;

f) El término "Acuerdo" significa este Acuerdo, su Anexo y cualquier enmienda a los mismos;

g) El término "Rutas especificadas" significa las rutas establecidas o a establecer en el Anexo al presente Acuerdo;

h) El término "Servicios acordados" significa los servicios aéreos internacionales que puedan ser operados, según lo establecido en las disposiciones del presente Acuerdo, en las rutas especificadas;

i) El término "Tarifa" significa los precios del transporte de pasajeros, equipaje y mercancías y las condiciones en que se aplican, así como los precios y condiciones referentes a los servicios de agencia y otros servicios auxiliares, con la excepción de las remuneraciones o condiciones relativas al transporte de correo.

ARTICULO II

DERECHOS OPERATIVOS DE TRAFICO

1. Cada Parte Contratante concederá a la otra Parte Contratante los derechos especificados en el presente Acuerdo, con el fin de establecer los servicios aéreos regulares internacionales en las rutas especificadas en la correspondiente sección del Anexo al presente Acuerdo.
2. La empresa aérea designada por cada Parte Contratante gozará de los siguientes privilegios:
 - a) A sobrevolar sin aterrizar el territorio de la otra Parte Contratante;
 - b) A hacer escalas en dicho territorio para fines no comerciales; y

- c) A hacer escalas en dicho territorio en los puntos especificados en el Cuadro de Rutas del Anexo al presente Acuerdo, con el propósito de embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga en tráfico internacional procedente o con destino al territorio de la otra Parte Contratante o procedente o con destino al territorio de otro Estado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo al presente Acuerdo.
3. Ninguna disposición del párrafo 2 del presente artículo podrá ser considerada en el sentido de que se confiera a la empresa aérea de una Parte Contratante el privilegio de embarcar, en el territorio de la otra Parte Contratante, pasajeros, carga o correo para su transporte con o sin remuneración o precio con destino a otro punto en el territorio de la otra Parte Contratante.
 4. No obstante lo establecido en los párrafos (1) y (2) del presente artículo, las operaciones de servicios acordados en áreas conflictivas o de ocupación militar, o en áreas afectadas por lo anterior, estarán sujetas a la aprobación de las Autoridades competentes militares, según lo establecido en el artículo 9 del Convenio.

ARTICULO III

AUTORIZACIONES DE OPERACION

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, una empresa aérea con el fin de explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas.
2. Al recibir dicha designación, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los párrafos 4) y 5) del presente artículo, conceder, sin demora, a la empresa aérea designada las correspondientes autorizaciones de explotación.
3. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de retirar la designación de cualquiera de tales empresas aéreas y de designar otra empresa aérea, a través de una notificación escrita a la otra Parte Contratante.
4. A la empresa aérea designada por cualquier Parte Contratante se le podrá exigir que demuestre a la otra Parte Contratante que está en condiciones de cumplir las obligaciones prescritas en las Leyes y Reglamentos normal y razonablemente aplicados por dicha Parte Contratante a la explotación de servicios aéreos internacionales de conformidad con las disposiciones del Convenio.

5. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de negar la autorización de explotación mencionada en el párrafo 2) de este artículo, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio, por parte de una empresa aérea designada, de los derechos especificados en el artículo II del presente Acuerdo, cuando no esté convencida de que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo de esta empresa se hallen en manos de la Parte Contratante que ha designado a la empresa o de sus nacionales.
6. Cuando una empresa aérea haya sido de este modo designada y autorizada, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios convenidos, siempre que esté en vigor en dichos servicios una tarifa establecida de conformidad con las disposiciones del artículo X del presente Acuerdo y que se haya llegado a un acuerdo en relación con dicho servicio según lo establecido en las disposiciones del artículo V del presente Acuerdo.

ARTICULO IV

SUSPENSION Y REVOCACION

1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de revocar la autorización de explotación concedida a la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, o de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el artículo II del presente Acuerdo, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:
 - a) Cuando no esté convencida de que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo de la empresa aérea se halle en manos de la Parte Contratante que designa a la empresa aérea o de sus nacionales, o
 - b) Cuando esta empresa aérea no cumpla las Leyes y Reglamento de la Parte Contratante que otorga estos derechos, o
 - c) Cuando la empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Acuerdo.
2. A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el párrafo 1) de este artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las Leyes o Reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante. En tal caso, darán comienzo consultas dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la solicitud de consultas realizada por cualquiera de las Partes Contratantes.

ARTICULO V

CAPACIDAD

1. Las empresas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes gozarán de una oportunidad justa y equitativa para la explotación de los servicios convenidos en las rutas especificadas.
2. Los servicios convenidos en cualquiera de las rutas especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, tendrán por objeto esencial ofrecer una capacidad adecuada para el transporte del tráfico originado en, o con destino al territorio de la Parte Contratante que haya designado a la empresa aérea.
3. La empresa aérea designada de una de las Partes Contratantes deberá tomar en consideración, al operar los servicios convenidos, los intereses de la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante, a fin de no afectar de forma indebida los servicios que esta última realiza en parte o en la totalidad de la misma ruta.
4. La capacidad que ha de ser ofrecida, la frecuencia de los servicios que ha de ser operada y la naturaleza del servicio aéreo, esto es, el tránsito o la terminación en el territorio de la otra Parte Contratante habrán de ser acordadas entre las Autoridades Aeronáuticas según los principios expuestos en el presente artículo y serán especificadas en un intercambio de cartas entre las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes.
5. Cualquier incremento en la capacidad o en la frecuencia de los servicios que han de ser operados por la empresa aérea designada de la otra Parte Contratante deberá ser acordado entre las Autoridades Aeronáuticas en base de las exigencias estimadas del tráfico entre los territorios de las dos Partes y de cualquier otro tráfico que se acuerde y se determine conjuntamente.

Mientras no se llegue a un tal acuerdo o solución, prevalecerá la capacidad y la frecuencia ya en vigor.

ARTICULO VI

CERTIFICADOS Y LICENCIAS

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos de aptitud y las licencias expedidas o convalidadas por una de las Partes Contratantes y no caducadas, serán reconocidos como válidos por la otra Parte Contratante para la explotación de los servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, con tal que los requisitos bajo los que tales certificados o licencias fueron expedidos o convalidados sean iguales o superiores al mínimo que pueda ser establecido según lo dispuesto en el Convenio de Aviación Civil Internacional.
2. Cada Parte Contratante se reserva, no obstante, el derecho de no reconocer la validez para el sobrevuelo de su propio territorio, de los títulos de aptitud y las licencias expedidos a sus propios súbditos por la otra Parte Contratante.

ARTICULO VII

SEGURIDAD

1. De conformidad con los derechos y obligaciones que les impone el derecho internacional, las Partes Contratantes ratifican que su obligación mutua de proteger la seguridad de la Aviación Civil contra actos de interferencia ilícita, constituye parte integrante del presente Acuerdo. Sin limitar la validez general de sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes Contratantes actuarán, en particular, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de Septiembre de 1.963, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de Diciembre de 1.970 y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de Septiembre de 1.971.
2. Las Partes Contratantes se prestarán mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

3. Las Partes actuarán, en sus relaciones mutuas, de conformidad con las disposiciones sobre seguridad de la Aviación establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y que se denominan Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que esas disposiciones sobre seguridad sean aplicables a las Partes; las mismas exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, o los explotadores que tengan la oficina principal o residencia permanente en su territorio, y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad de la Aviación.
4. Cada Parte Contratante conviene en que puede exigirse a dichos explotadores de aeronaves que observen las disposiciones sobre seguridad de la Aviación que se mencionan en el párrafo anterior, exigidas por la otra Parte Contratante para la entrada, salida o permanencia en el territorio de esa Parte Contratante.
5. Cada Parte Contratante se asegurará de que en su territorio se aplican efectivamente medidas adecuadas para proteger a la aeronave e inspeccionar a los pasajeros, la tripulación, los efectos personales, el equipaje, la carga y suministros de la aeronave antes y durante el embarque o la estiba. Cada una de las Partes Contratantes estará también favorablemente predispuesta a atender toda solicitud de la otra Parte Contratante de que adopte medidas especiales razonables de seguridad con el fin de afrontar una amenaza determinada.
6. Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de tales aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, las Partes Contratantes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en forma rápida y segura, a dicho incidente o amenaza.
7. De conformidad con lo anterior, cada Parte Contratante advertirá a la otra Parte Contratante de cualquier diferencia que pueda existir entre su normativa y práctica nacional y las disposiciones anteriormente citadas sobre Seguridad Aérea. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar en cualquier momento que se celebren inmediatamente consultas con la otra Parte Contratante para discutir cualquiera de las citadas diferencias.

ARTICULO VIII

EXENCION DE DERECHOS A LA IMPORTACION Y OTROS GRAVAMENES

1. Las aeronaves utilizadas en los servicios aéreos internacionales por la empresa aérea designada por cada una de las Partes Contratantes, así como su equipo habitual, combustible, lubricantes y provisiones (incluyendo los alimentos, bebidas y tabaco) a bordo de dichas aeronaves, estarán exentos de todos los derechos a la importación, tasas de inspección y de los demás impuestos y gravámenes exigibles a la entrada en el territorio de la otra Parte Contratante, siempre que tal equipo y mercancías permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento de su reexportación.
2. Estarán igualmente exentos de los mismos derechos e impuestos, con excepción de los derechos por el servicio prestado:
 - a) las provisiones de a bordo embarcadas en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, dentro de los límites fijados por las Autoridades de dicha Parte Contratante, para su consumo a bordo de las aeronaves que operan una ruta especificada de la otra Parte Contratante;
 - b) Piezas de recambio introducidas en el territorio de una de las Partes Contratantes para el mantenimiento o reparación de las aeronaves utilizadas en la ruta especificada por la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante;
 - c) El combustible y lubricantes destinados al abastecimiento de las aeronaves utilizadas por la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante incluso cuando estas provisiones se consuman durante el vuelo sobre el territorio de la Parte Contratante en que se hayan embarcado; y
 - d) Equipaje y carga en tránsito directo.
3. El equipaje habitual de las aeronaves, así como los materiales y provisiones a bordo de las aeronaves utilizadas por la empresa aérea designada de una Parte Contratante, no podrán desembarcarse en el territorio de la otra Parte Contratante sin la aprobación de las Autoridades aduaneras de dicho territorio. En tal caso, se mantendrán bajo la vigilancia de dichas Autoridades hasta que sean reexportados o hayan recibido otro destino de conformidad con la Reglamentación aduanera.

4. Ya que no habrán de ser gravadas las mercancías mencionadas en los párrafos 1 a 3 del presente artículo ni con derechos ni con otras cargas, dichas mercancías no estarán sujetas a ningún tipo de prohibición y restricción económica a la importación, exportación y tránsito que puedan ser aplicables de alguna otra forma, salvo que dicha prohibición o restricción se aplique a todas las empresas aéreas incluida la empresa aérea nacional en lo que respecta a determinados objetos que se mencionan en los párrafos 1 a 3 del presente artículo.
5. El trato especificado en el presente artículo se aplicará adicionalmente y sin perjuicio de lo que cada Parte Contratante tiene la obligación de acordar según lo establecido en el artículo 24 del Convenio.

ARTICULO IX

TRAFICO DE TRANSITO DIRECTO

Con sujeción a lo que establezcan las Leyes y los Reglamentos de cada Parte Contratante, los pasajeros, el equipaje y la carga en tránsito a través del territorio de cualquiera de las Partes Contratantes no estarán, en principio, sujetos a control.

ARTICULO X

ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS

1. Las tarifas aplicables por la empresa aérea designada de una de las Partes Contratantes por el transporte con destino al territorio de la otra Parte Contratante o proveniente de él, se establecerán a unos niveles razonables, teniendo en cuenta todos los elementos relevantes, incluido el coste de explotación, un beneficio razonable y las tarifas aplicadas por otras empresas aéreas.
2. Las tarifas mencionadas en el párrafo 1) de este artículo se acordarán, si es posible, por las empresas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes, previa consulta con las otras empresas que operen en toda la ruta o parte de ella, y las empresas llegarán a este acuerdo recurriendo, en la medida de lo posible, al procedimiento para la elaboración de tarifas de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional.

3. Las tarifas así acordadas se someterán a la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, al menos sesenta (60) días antes de la fecha propuesta para su entrada en vigor.

En casos especiales, este plazo podrá reducirse con el consentimiento de dichas Autoridades.

4. La aprobación podrá concederse expresamente. Si ninguna de las dos Autoridades Aeronáuticas ha expresado su disconformidad en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que la notificación haya tenido lugar, conforme al párrafo 3) de este artículo, dichas tarifas se considerarán aprobadas. En caso que se reduzca el plazo de notificación en la forma prevista en el párrafo 3), las Autoridades Aeronáuticas pueden acordar que el plazo para la notificación de cualquier disconformidad sea inferior a treinta (30) días.
5. Cuando no se haya podido acordar una tarifa conforme a las disposiciones del párrafo 2) del presente artículo o cuando una Autoridad Aeronáutica, en los plazos mencionados en el párrafo 4) de este artículo, manifieste a la otra Autoridad Aeronáutica su disconformidad respecto a cualquier tarifa acordada conforme a las disposiciones del párrafo 2), las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes, previa consulta a las Autoridades Aeronáuticas de cualquier Estado cuyo consejo se considere útil, tratarán de determinar la tarifa de mutuo acuerdo.
6. Si las Autoridades Aeronáuticas no pueden llegar a un acuerdo sobre la tarifa que se les someta conforme al párrafo 3) del presente artículo, o sobre la determinación de una tarifa según el párrafo 5) de este artículo, la controversia se resolverá con arreglo a las disposiciones previstas en el Artículo XVII del presente Acuerdo.
7. Una tarifa establecida conforme a las disposiciones del presente artículo continuará en vigor hasta el establecimiento de una nueva tarifa. Sin embargo, una tarifa no podrá prolongarse, en virtud de este párrafo, por un periodo superior a doce (12) meses desde la fecha en que aquella debería haber expirado.

ARTICULO XI

TRANSFERENCIA DE EXCEDENTES DE INGRESOS

1. Las empresas aéreas de las Partes Contratantes tendrán libertad para vender los servicios de transporte aéreo en los territorios de ambas Partes Contratantes, ya sea directamente o a través de un agente y en cualquier moneda.

2. Las empresas aéreas de las Partes Contratantes tendrán libertad para transferir desde el territorio de venta a su territorio nacional, los excedentes de los ingresos respecto a los gastos obtenidos en el territorio de la venta. En dicha transferencia neta se incluirán los ingresos de las ventas realizadas directamente o a través de un agente, de los servicios de transporte aéreo, y de los servicios auxiliares y suplementarios, así como el interés comercial normal obtenido de dichos ingresos, mientras que se encontraban en depósito esperando la transferencia.
3. Las empresas aéreas de las Partes Contratantes recibirán autorización en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la solicitud, para que dichas transferencias se realicen en moneda libremente convertible, al tipo de cambio oficial para su conversión en la moneda local, a la fecha de su autorización.

ARTICULO XII

PERSONAL TECNICO Y COMERCIAL

1. A la empresa aérea designada de cada Parte Contratante se le permitirá, en base de reciprocidad, mantener en el territorio de la otra Parte Contratante a sus representantes y al personal comercial, técnico y de operaciones que sea necesario en relación con la operación de los servicios convenidos.
2. Estas necesidades de personal podrán, a opción de la empresa aérea designada de cada Parte Contratante, ser cumplidos por su propio personal o mediante los servicios de cualquier otra organización, compañía o empresa aérea que preste sus servicios en el territorio de la otra Parte Contratante y que esté autorizada para prestar dichos servicios en el territorio de dicha Parte Contratante.
3. Los representantes y el personal deberán estar sujetos a las Leyes y Reglamentos en vigor de la otra Parte Contratante, y de conformidad con dichas Leyes y Reglamentos, cada Parte Contratante deberá conceder, en base de reciprocidad y con un mínimo de demora, las correspondientes autorizaciones de empleo, visado de visitantes u otros documentos similares a los representantes y al personal a que hace mención el párrafo 1) de este artículo.

4. Las dos Partes Contratantes deberán eximir de los requisitos de autorización de empleo o visados de visitantes u otros documentos similares al personal que preste ciertos servicios y funciones de carácter temporal, excepto en circunstancias especiales determinadas por las Autoridades nacionales en cuestión. Cuando se exijan dichas autorizaciones, visados documentos, se expedirán con prontitud para no retrasar la entrada al Estado del personal en cuestión.

ARTICULO XIII

LEYES Y REGLAMENTOS

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante que regulen en su territorio la entrada y salida de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional o relativas a la operación de dichas aeronaves durante su permanencia dentro de los límites de su territorio, se aplicarán a las aeronaves de la empresa aérea designada por la otra Parte Contratante.
2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el territorio de cada Parte Contratante la entrada, permanencia o salida de pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo y carga, así como los trámites relativos a las formalidades de entrada y salida del país, a la emigración, a las aduanas y a las medidas sanitarias, se aplicarán en dicho territorio a las operaciones de la empresa aérea designada de la otra Parte Contrante.

ARTICULO XIV

CONSULTAS

1. Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán de vez en cuando con espíritu de estrecha colaboración, a fin de asegurar la aplicación y cumplimiento satisfactorio de las disposiciones de este Acuerdo y de su Anexo.
2. Dichas consultas comenzarán dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en la que se haya recibido la solicitud, a menos que se acuerde de otra forma por las Partes Contratantes.

ARTICULO XV

MODIFICACIONES

1. Si cualquiera de las Partes Contratantes estima conveniente modificar alguna de las disposiciones del presente Acuerdo, podrá solicitar una consulta con la otra Parte Contratante. Dicha consulta, podrá llevarse a cabo entre las Autoridades Aeronáuticas y podrá realizarse verbalmente o por escrito y se iniciará dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la solicitud.

Cualquier modificación acordada de esta manera entrará en vigor cuando haya sido confirmada mediante Canje de Notas por vía diplomática.

2. Las modificaciones del Anexo al presente Acuerdo podrán hacerse mediante acuerdo directo entre las Autoridades Aeronáuticas competentes de las Partes Contratantes y serán confirmadas mediante Canje de Notas por vía diplomática.

ARTICULO XVI

CONFORMIDAD CON CONVENIOS MULTILATERALES

En el caso en que se concluya cualquier Convenio multilateral general relativo al Transporte Aéreo que obligue a ambas Partes Contratantes, el presente Acuerdo será modificado para estar en armonía con las disposiciones de dicho Convenio.

ARTICULO XVII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. En el caso de surgir una controversia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre las Partes Contratantes, éstas se esforzarán, en primer lugar, para solucionarla mediante negociaciones.
2. Si las Partes Contratantes no llegan a una solución mediante negociaciones, las mismas podrán acordar que se someta la disputa a la decisión de alguna persona u órgano, o la disputa podrá ser sometida a petición de cualquiera de las Partes Contratantes a la

decisión de un tribunal de tres árbitros, uno nombrado por cada Parte Contratante y un tercero designado por los dos así nombrados. Cada una de las Partes Contratantes nombrará un árbitro dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que reciba cualquiera de las Partes Contratantes una nota de la otra Parte Contratante, por vía diplomática, solicitando el arbitraje de la controversia, y el tercer árbitro se designará dentro de un nuevo plazo de sesenta (60) días. Si cualquiera de las Partes Contratantes no nombra un árbitro dentro del plazo señalado o si el tercer árbitro no ha sido nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir al Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que nombre un árbitro o árbitros, según el caso. En cualquier caso, el tercer árbitro será un nacional de un tercer Estado y actuará como Presidente del Tribunal Arbitral.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a respetar toda decisión tomada de acuerdo con el párrafo 2) del presente Artículo.
4. En el caso en que cualquiera de las Partes Contratantes o una empresa aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes no respete una decisión acordada según lo establecido en el párrafo 3 del presente Artículo, la otra Parte Contratante podrá limitar, suspender o revocar cualquier derecho o privilegio que haya concedido en virtud del presente Acuerdo a la Parte Contratante que incumple o a la empresa aérea designada de dicha Parte Contratante o a la empresa aérea designada que incumple.

ARTICULO XVIII

INTERCAMBIO DE DATOS ESTADISTICOS

La Autoridad Aeronáutica de cualquier Parte Contratante deberá facilitar a la Autoridad Aeronáutica de la otra Parte Contratante, si le fuese solicitado, las informaciones y otros datos estadísticos que sean razonablemente necesarios para examinar la capacidad ofrecida en los servicios acordados por las empresas aéreas designadas de las Partes Contratantes.

ARTICULO XIX

DENUNCIA

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, notificar por escrito por vía diplomática a la otra Parte Contratante su decisión de denunciar el presente Acuerdo. Esta notificación se comunicará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional.
2. En tal caso, el Acuerdo terminará doce (12) meses después de la fecha en que reciba la notificación la otra Parte Contratante, a menos que dicha notificación de denuncia se retire por acuerdo mutuo antes de la expiración de dicho plazo. Si la Parte Contratante no acusase recibo de dicha notificación, ésta se considerará recibida catorce (14) días después de que la Organización de Aviación Civil Internacional haya recibido la notificación.

ARTICULO XX

REGISTRO

El presente Acuerdo y toda modificación al mismo, se registrarán en la Organización de Aviación Civil Internacional.

ARTICULO XXI

ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de la firma y entrará en vigor en el momento en que ambas Partes Contratantes se hayan notificado por escrito mutuamente, mediante Canje de Notas Diplomáticas, el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales para su definitiva entrada en vigor.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en dos ejemplares en Madrid, el día cinco de Octubre de mil novecientos noventa y tres, en los idiomas español, indonesio e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.

En el caso de cualquier divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Haryanto", with a horizontal line underneath.

DR. HARYANTO DHANUTIRTO.
MINISTRO DE COMUNICACIONES.

POR EL GOBIERNO DEL
REINO DE ESPAÑA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier Solana", written in a cursive style.

JAVIER SOLANA MADARIAGA.
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

ANEXO

1. Sección I

Rutas a operar en ambas direcciones por la empresa aérea designada del Reino de España:

<u>Puntos de origen</u>	<u>Puntos intermedios</u>	<u>Puntos de destino</u>	<u>Puntos mas allá</u>
Puntos en España	dos puntos intermedios	Yakarta y/o otro punto acordado mutuamente	Puntos más allá

Sección II

Rutas a operar en ambas direcciones por la empresa aérea designada de la República de Indonesia:

<u>Puntos de origen</u>	<u>Puntos intermedios</u>	<u>Puntos de destino</u>	<u>Puntos mas allá</u>
Puntos en Indonesia	dos puntos intermedios	Madrid y/o otro punto acordado mutuamente	Puntos más allá

2. La empresa aérea designada por una Parte Contratante sólo podrá hacer escala en el mismo servicio en un solo punto situado en el territorio de la otra Parte Contratante.
3. La empresa aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes podrá omitir en alguno o en todos los vuelos la escala en cualquiera de los puntos anteriormente citados, siempre que los servicios acordados en esta ruta comiencen o terminen en el territorio de dicha Parte Contratante.

AIR TRANSPORT AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN

RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN
RELATING TO AIR SCHEDULED SERVICES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain hereinafter called in this Agreement as the Contracting Parties;

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories,

have agreed as follows:

ARTICLE I

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annex or Convention under Articles 90 and 94 hereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications and in the case of the Kingdom Spain, the Minister of Public Works, Transports and Environment, (Director General of Civil Aviation), or, in both cases, any person or body duly authorized to perform any function exercised by the said Authorities;

c) the term "designated airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with Article III of the present Agreement;

- d) the term "territory" means the land territory and the territorial sea as defined in its respective laws according to Article 2 of the Chicago Convention on International Civil Aviation (1.944) as well as part IV of the United Nations Convention on the Law of the sea, 1.982;
- e) the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f) the term "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
- g) the term "specified routes" means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;
- h) the term "agreed services" means the international air services which can be operated, according to the provisions of this Agreement, on the specified routes;
- i) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail.

ARTICLE II

TRAFFIC RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing international scheduled air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex thereto.
2. The airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges:
 - a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - b) to make stops in the said territory for non-traffic purpose, and,

- c) to make stops in the said territory at points specified in the Route Schedule in the Annex to this Agreement for the purpose of taking on or putting down, on international traffic, passengers, cargo and mail in accordance with the provisions of the Annex to this Agreement, to or from the territory of the other Contracting Party or to or from the territory of another State.
3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried with or without remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

ARTICLE III

OPERATING AUTHORIZATIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraphs (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorizations.
3. Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline and to designate another one.
4. The airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.

5. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article (II) of the present Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
6. When an airline has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article (X) of the present Agreement is in force and an agreement in accordance with the provisions of Article (V) of the present Agreement has been reached in respect of that service.

ARTICLE IV

SUSPENSION AND REVOCATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article (II) of the present Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:
 - a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party, or
 - b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or
 - c) in case the airline otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

ARTICLE V

CAPACITY

1. There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.
2. The agreed services on any of the routes specified in the Annex to this Agreement shall have as their primary objective the provision of capacity adequate for transportation of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline.
3. In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
4. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities in accordance with the principles laid down in this Article, and shall be specified in an exchange of letters between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.
5. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of the other Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities, on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two parties and any other traffic to be jointly agreed and determined.

Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

ARTICLE VI

CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the specified

routes in the Annex to this Agreement, provided that the requirements under which such certificates and licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the International Civil Aviation Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognize the validity of the certificates of competency and the licences granted to its own nationals by the other Contracting Party, for the purpose of overflying its own territory.

ARTICLE VII

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1.963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1.970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1.971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircrafts of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in the paragraph above required by the other Contracting Party for the entry into, departure from, or while within, the territory of that Contracting Party.
5. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
7. Accordingly each Contracting Party shall advise the other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the aforementioned aviation security provisions. Either Contracting Party may request immediate consultation with the other Contracting Party at any time to discuss any such difference.

ARTICLE VIII

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international services by the airline designated by each Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants and the aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all custom duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2. There shall also be exempt from the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed:
 - a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party;

- b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party;
 - c) fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board;
 - d) baggage and cargo in direct transit.
3. The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of such a territory.
- In such a case, they will be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the Customs regulations.
4. In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.
5. The treatment specified in this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.

ARTICLE IX

DIRECT TRANSIT TRAFFIC

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party, passengers, baggage and cargo in transit across the territory of either Contracting Party shall, in principle, not be subject to control.

ARTICLE X

ESTABLISHMENT OF TARIFFS

1. The tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction.

In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
4. This approval may be given explicitly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty days.
5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (4) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2), the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XVII in this Agreement.
7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it otherwise would have expired.

ARTICLE XI

TRANSFER OF EXCESS OF RECEIPTS

1. The airlines of the Contracting Parties shall be free to sell air transport services in the territories of both Contracting Parties, either directly or through an agent, in any currency.
2. The airlines of the Contracting Parties shall be free to transfer from the territory of sale to their home territory the excess, in the territory of sale, on receipts over expenditure. Included in such net transfer shall be revenues from sales, made directly or through an agent of air transport services, and ancillary or supplementary services, and normal commercial interest earned on such revenues while on deposit awaiting transfer.
3. The airlines of the Contracting Parties shall receive approval for such transfer within at most 30 days of application, into a freely convertible currency, at the official rate of exchange for conversion into the local currency, as at date of approval.

ARTICLE XII

TECHNICAL AND COMMERCIAL PERSONNEL

1. The designated airline of each Contracting Party shall be allowed on the basis of reciprocity, to maintain in the territory of the other Contracting Party, their representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of the agreed services.

2. These staff requirements may, at the option of the designated airline of each Contracting Party, be satisfied by its own personnel or by using the services of any other organisation, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorised to perform such services in the territory of that Contracting Party.
3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Contracting Party, and, consistent with such laws and regulations, each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary employment authorisations, visitor visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this Article.
4. Both Contracting Parties shall dispense with the requirement of employment authorisations or visitor visas or other similar documents in the case of personnel performing certain temporary services and duties except in special circumstances determined by the national authorities concerned. Where such authorisations, visas or documents are required, they shall be issued promptly so as not to delay the entry of such personnel into the State concerned.

ARTICLE XIII

LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of aircraft engaged in international air services or related to the operation of aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations controlling the entry, stay and departure of passengers, crew, baggage, mail and cargo, over the territory of each Contracting Party, and also the regulations related to the requirements of entry and departure from the country, immigration, customs and sanitary rules, shall be applied in such territory to the operations of the designated airline of the other Contracting Party.

ARTICLE XIV

CONSULTATIONS

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.
2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

ARTICLE XV

MODIFICATIONS

1. If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request.

Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2. Modifications to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the competent Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XVI

CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

ARTICLE XVII

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In any case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the Arbitral Body.
3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.
4. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (3) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE XVIII

EXCHANGE OF STATISTICAL DATA

The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authority of the other Contracting

Party upon their request such informations or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties.

ARTICLE XIX

TERMINATION

1. Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization.
2. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE XX

REGISTRATION

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE XXI

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall apply provisionally on the date of signature and definitively enter into force as soon as both Contracting Parties give written notification to each other by exchange of Diplomatic notes that their respective constitutional requirements for definite entry into force have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Madrid, this fifth day of October 1993, in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.


In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryanto', with a horizontal line drawn underneath it.

DR. HARYANTO DHANUTIRTO.
MINISTER OF COMMUNICATIONS

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SPAIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Solana', written in a cursive style.

JAVIER SOLANA MADARIAGA.
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ANNEX

I. Section I.

Routes to be served by the designated airline of the Kingdom of Spain in both directions:

<u>Points of Departure</u>	<u>Intermediate Points</u>	<u>Points of Destination</u>	<u>Points Beyond</u>
Points in Spain	two intermediate points	Jakarta and/or another point mutually agreed upon	points beyond

Section II.

Routes to be served by the designated airline of the Republic of Indonesia in both directions:

<u>Points of Departure</u>	<u>Intermediate Points</u>	<u>Points of Destination</u>	<u>Points Beyond</u>
Points in Indonesia	two intermediate points	Madrid and/or another point mutually agreed upon	points beyond

2. The airline designated by a Contracting Party may only stop on the same service in one single point located in the territory of the other Contracting Party.
3. The designated airline of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party.



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0080/CTC/07/2020/52
Number



Purnomo A. Chandra
NIP. 19670223 199103 1 001

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Acting Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 04 Agustus 2020
Date